



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DALAM RAPAT PENGEMBANGAN APLIKASI E-KINERJA KOMINFO
BPRTIK, 11 Oktober 2017

- Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika masih terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai langkah nyata perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Langkah perbaikan ini dilaksanakan juga guna menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap AKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2016.
- Salah satu hal krusial yang diyakini mampu mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan kinerja di Kominfo adalah penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja.
- Aplikasi kinerja elektronis, yang selanjutnya kita sebut dengan Aplikasi e-Kinerja, menjadi *tools* yang sangat penting dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Menjadi bagian dari *early warning system* yang dapat mengingatkan dan memitigasi resiko kegagalan program sedini mungkin apabila dimanfaatkan dengan baik.
- Evaluasi kinerja yang komprehensif dan terorganisir dengan baik akan mampu mendorong persentase keberhasilan program kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, dan menjadi *feedback* untuk penyusunan program dan anggaran di tahun berikutnya.
- Akan tetapi, aplikasi kinerja hanya menjadi sebuah alat yang tidak akan bermanfaat jika personil tiap satuan kerja tidak disiplin dan serius melakukan pemantauan dan pelaporan kinerja. Kita harus mulai meninggalkan stigma lama yang beranggapan bahwa evaluasi dan pelaporan kinerja bersifat: hanya menjadi laporan formalitas,

tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dan menghabiskan waktu dan tenaga.

- Perubahan *mindset* terhadap evaluasi kinerja harus dimulai dari sekarang, karena situasi pemerintahan saat ini semakin menuntut kementerian/lembaga untuk lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran, dan menjalankan seluruh program kerja secara lebih efektif dan efisien.
- Pemantauan dan evaluasi kinerja tidak hanya menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, dan pelaksana program kerja di satuan kerja terkait. Ketika mekanisme pengelolaan kinerja sudah jelas, dan aplikasi e-kinerja telah siap digunakan, saya mengharapkan komitmen dan konsistensi seluruh pengelola kinerja satuan kerja untuk secara aktif dan bertanggung jawab melaksanakan prosedur pelaporan kinerja.
- Selanjutnya, dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB pada hari Senin lalu tanggal 9 Oktober 2017, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki bersama, yaitu:
 1. *Cascading* indikator kinerja pada tiap level (eselon I, II, III dan IV) perlu dicek kembali, agar memperhatikan prinsip keselarasan.
 2. Pemantauan dan pengukuran kinerja triwulanan dilaksanakan secara konsisten melalui aplikasi elektronik.
 3. Sinkronisasi SKP dengan Perjanjian Kinerja.
- Poin tersebut saya harapkan dapat ditindaklanjuti ke dalam langkah nyata oleh Biro Perencanaan, PDSI, Seluruh PPL Unit Kerja, dan Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola kinerja atas kerjasama dan komitmennya untuk terus melaksanakan perbaikan akuntabilitas kinerja.

SEKRETARIS JENDERAL

ttd

FARIDA DWI CAHYARINI